

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- C. Aimir. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- G. Kartasapoetra. 1984. *Hukum Tanah: Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J.B. Daliyo, dkk. 2011. *Hukum Agraria I (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: Prenhallindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- M. H. Kusumah. 2019. *Pembaharuan Kewenangan*. Bandung: PT Alumni.
- Mudjiono. 1977. *Politik Hukum Agraria*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Daud Ali. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan*

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2006. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Siah Khosyi'ah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sulaksono. 2023. *Teori-Teori Administrasi Negara*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

A. S. Roban. 2022. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.

Faitmai Zuhrai. 2024. "Kedudukan Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura)." Skripsi, Universitas Malikussaleh.

Khalisha, dkk. 2023. “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan Oleh Keuchik atas Hak Guna Usaha (Studi Penelitian di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2.

M. S. Zubaidi. 2022. “Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.” Skripsi.

Muhammad Ikhsan. 2023. “Efektivitas Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.” Skripsi.

Mustafidin. 2023. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Wonopringgo.” Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

S. Noor. 2021. “Dinamika Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara).” Skripsi.

Yusrizal, dkk. 2026. “Penerapan Asas Publisitas Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik (Studi Penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 14, No. 1.

Z. Yasin. 2020. “Penerapan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap Persertifikatan Tanah Wakaf untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum.” Skripsi, Universitas Islam Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.